

**IMPLEMENTASI SAKTI FULL MODUL PADA LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN PADA SATUAN KERJA
DI KANTOR PELAYANANAN PERBENDAHRAAN
NEGARA (KPPN) PALU**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Perbankan syariah (Psy)
Fakultas Ekonomi dan bisnis islam (FEBI) Universitas Islam
Negeri (UIN) Datokarama Palu*

Oleh :

**AGUNG WAHYUDI
NIM : 19.5.15.0107**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH (PSY) EKONOMI DAN
BISNIS ISLAM (FEBI) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
DATOKARAMA PALU SULAWESI TENGAH
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul **“Implementasi SAKTI Full Modul Pada Laporan Pertanggungjawaban Satuan kerja di Kantor pelayanan Perbandaharaan Negara (kppn) Palu** benar adalah hasil karya penulis sendiri, jika di kemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Palu, 19 November 2024



iyudi

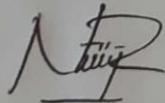
NIM: 19.5.15.0107

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Implementasi SAKTI Full Modul Pada Laporan Pertanggungjawaban Satuan kerja di Kantor pelayanan Perbandaharaan Negara (kppn) Palu" Oleh mahasiswa atas nama : **AGUNG WAHYUDI** NIM : 19.5.15.0107, Mahasiswa Prodi: Perbankan syariah (Psy) Fakultas Ekonomi dan bisnis islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat Ilmiah dan dapat diajukan untuk di hadapan dewan penguji.

Palu, 19 November 2024 M
30 Syawal 1443 H

Pembimbing I



Nur Wanita, S.Ag., M.Ag
NIP. 19760626 200710 2 008

Pembimbing II



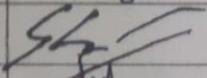
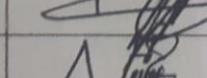
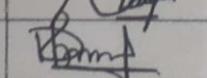
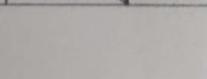
Dede Arseyani Pratamasyari, S.Si., M.Si
NIP. 19900608 201903 2 009

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudari Agung Wahyudi Nim. 19.5.15.0107 dengan judul **“Implementasi Sakti Full Modul Pada Laporan Pertanggungjawaban Satuan Di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Kppn)”** yang telah diujikan di hadapan dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu pada tanggal 20 Januari 2025 M yang bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1446 H dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada program studi perbankan syariah dengan beberapa perbaikan.

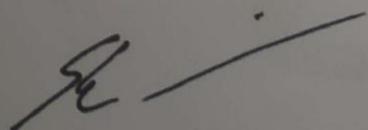
Palu, 20 Januari 2025 M
20 Rajab 1446 H

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. Sagir Muhammad Amin, M.Pd.I	
Munaqisy I	Noval, M.M.	
Munaqisy II	Nuriatullah, SEI., M.,EK	
Pembimbing I	Nur Wanita, S.Ag., M.Ag	
Pembimbing II	Dede Arseyani Pratamasyari, S.Si., M.Si	

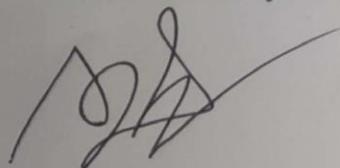
Mengetahui :

Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



Dr. Sagir Muhammad Amin, M.Pd.I
NIP. 19650612 199203 1 004

Ketua
Jurusan Perbankan Syariah



Abdul Jalil, S.E., M.M
NIP. 19871110 201903 1 006

KATA PENGANTAR



إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَسْتَهْدِيهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا
وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ُ

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga pada ummatnya hingga akhir zaman.

Penyusunan dan penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua Penulis, Ayahanda Wahyudin Nur dan Salmia tercinta dan tersayang, yang membesarkan, mendidik, membiayai, serta memberikan motivasi dan dukungan yang tak terhitung, doa yang selalu dipanjatkan serta curahan kasih sayang yang tak tergantikan oleh siapapun, yang banyak memberikan pelajaran tentang kehidupan ini dan juga untuk kakak Saya Vinny wahyuni dan adik saya Mohammad Ayyub yang selalu memberikan semangat.
2. Prof. Dr. H. Lukman S Thahir, M.Ag. selaku Rektor UIN Datokarama Palu, Dr Hamka S.Ag., M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Hamlan M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Dr. Faisal Attamimi S.Ag. M.Fil.I selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

beserta jajarannya yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada penulis dalam segala hal.

3. Dr. Sagir Muhammad Amin, M.Pd.I selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr. Syakir Sofyan S.E.I., M.E.I., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr. Siti Aisyah S.E.I., M.E.I selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Malkan M. Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama dan Raodhah, S.Ag., M.Pd.I., selaku Kabag Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Bapak Jalil, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah, dan Ahmad Haekal, S.Hum., M.Si., selaku Sekertaris Program Studi Perbankan syariah yang selalu melayani mahasiswa dengan sangat baik.
5. Hamiyudin, M.H. selaku dosen penasehat akademik yang membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
6. Ibu Nur Wanita, S.Ag., M.Ag., selaku Pembimbing I dan Dede Arsyani Pratamasyari, S.Si., M.si selaku pembimbing II yang sangat membantu dengan ikhlas dan sabar serta telah membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini sampai selesai sesuai dengan harapan.
7. Bapak dan Ibu dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu yang telah mendidik penulis dengan berbagi bidang keilmuannya, semoga amal baik mereka membawa manfaat bagi peningkatan profesionalisme keilmuan.

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu yang dengan setia, tulus dan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan serta nasehat kepada penulis selama kuliah.
9. Staf Akademik dan Umum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama kuliah.
10. Rifai, S.E., M.M selaku Kepala Perpustakaan dan Staf Perpustakaan yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis.
11. Sahabat-sahabat di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu terutama untuk Magfira S.pd Gunawan dan Silva yang telah menemani penulis dari awal hingga akhir penyusunan skripsi. Angkatan 2019 khususnya rekan-rekan Program Studi Perbankan Syariah (Psy 4) yang selalu memberikan motivasi, dan dukungan serta bantuan selama penulis menjalani perkuliahan di Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Akhirnya, kepada semua pihak, penulis hanya bisa mendoakan sebab balasan kebaikan paling romantik adalah doa, dan semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah SWT. Aamiin

Palu, 19 November 2024
Penulis

Agung wahyudi
NIM: 19.5.15.0107

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
ABSTRAK.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Penegasan Istilah.....	6
E. Garis-Garis Besar Isi.....	8

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	9
B. Konsep Implementasi.....	12
C. SAKTI full modul.....	14
D. Laporan pertanggungjawaban.....	20

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian	23
B. Lokasi Penelitian.....	24
C. Kehadiran Peneliti.....	25
D. Data dan Sumber Data.....	25
E. Tehnik Pengumpulan Data	26
F. Tehnik Analisis Data.....	38
G. Pengecekan Ke Absahan Data.....	39

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil lembaga kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) Palu	33
B. Implementasi Sakti Full Modul Pada laporan pertanggungjawaban pada satuan kerja di KPPN Palu	40
C. Tantangan Teknis yang dihadapi dalam mengimplementasikan Aplikasi SAKTI full modul Pada laporan pertanggungjawaban di Satuan kerja Kota Palu.....	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	63
B. Implikasi.....	64
C. Saran.....	65

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN :

1. Pedoman Wawancara
2. Dokumentasi Wawancara
3. Surat izin penelitian
4. Surat balasan penelitian
5. Pengajuan judul skripsi
6. Kartu Seminar Proposal
7. Kartu Pembimbing Konsultasi Skripsi
8. Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nama Penulis : Agung Wahyudi

NIM : 19.5.15.0107

Judul Skripsi : Implementasi Sakti Full Modul Pada Laporan Pertanggungjawaban Satuan Kerja di Kppn Palu

Skripsi ini membahas tentang Implementasi Sakti Full Modul Pada Laporan Pertanggungjawaban Satuan Kerja di Kppn Palu. dengan rumusan masalah bagaimana implementasi sakti full modul pada laporan pertanggungjawaban di kppn palu, Apakah tantangan teknis yang dihadapi dalam mengimplementasikan SAKTI full modul pada laporan pertanggungjawaban di KPPN Palu.

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

Hasil penelitian ini, Implementasi SAKTI Full Modul pada laporan pertanggungjawaban di KPPN Palu adalah upaya untuk memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan secara lebih efektif, efisien, dan terintegrasi. Secara umum tugas KPPN ini sangat penting, karena bertanggungjawab untuk menjadi wakil bendahara umum dalam menyalurkan dan membebaskan biaya apapun yang ada di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah melakukan pencairan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), di mana anggaran tersebut sudah tertuang di dalam dokumen pelaksana anggaran DIPA (Daftar Isian Pelaksana Anggaran). Artinya dana APBN adalah tugas pemerintah, dana tersebut disalurkan ke daerah melalui satuan kerja (satker) vertikal masing-masing kementerian.

Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Full Modul membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya dalam hal penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) Satuan Kerja (Satker) di wilayah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palu. Implementasi SAKTI Full Modul juga memberikan dampak positif yang besar pada laporan pertanggungjawaban Satker di KPPN Palu. Meskipun terdapat beberapa tantangan teknis dan non-teknis, manfaat seperti peningkatan efisiensi, transparansi, dan akurasi laporan jauh lebih besar. Dalam jangka panjang, SAKTI akan memperkuat pengelolaan keuangan negara, mendukung tata kelola yang lebih baik, dan mempermudah pengawasan keuangan oleh lembaga terkait.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perekonomian dunia ini semakin berkembang, khususnya di Indonesia, perkembangan industri dan jasa keuangan telah mengalami kemajuan yang pesat beberapa tahun terakhir ini sebagai akibat dari kemajuan teknologi dan kebijaksanaan aplikasi. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dapat digunakan untuk melakukan pengelolaan keuangan APBN, mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban APBN. Aplikasi ini merupakan aplikasi unggulan dari Kementerian Keuangan dalam mengoptimalkan pengelolaan APBN. SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada sebelumnya dengan menerapkan konsep *single database* dan menggunakan sistem elektronik untuk seluruh transaksi bagi seluruh entitas akuntansi dan entitas pelaporan.¹

Aplikasi SAKTI telah diimplementasikan sejak tahun 2015 secara terbatas/piloting di beberapa satker pada 7 Kementerian/Lembaga (K/L) yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara, Bappenas, BPK, KPK, PPATK, dan LKPP. Pada tahun 2020, dilakukan migrasi Aplikasi SAKTI dari sebelumnya berbasis *desktop* menjadi berbasis web.² Penting untuk mengidentifikasi dan memahami alasan-alasan khusus yang mendorong implementasi SAKTI Full Modul dalam konteks KPPN Palu. Dengan memahami latar belakang ini, organisasi dapat lebih baik mempersiapkan diri untuk mengatasi tantangan dan memaksimalkan manfaat dari implementasi ini. Aplikasi SAKTI adalah wujud otomasi dan transformasi layanan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Hal tersebut juga sebagai perwujudan *e-governance* dalam fungsi-fungsi treasuri pemerintah dimana proses atau tata kelola keuangan

¹Ohn Doe, “Pengantar Implementasi Sistem Keuangan”, (Jurnal Keuangan Modern, Vol.20, No.2, 2021), 48.

²Jane Smith, “Penerapan SAKTI dalam Manajemen Keuangan Pemerintah”, (Jurnal Akuntansi Publik, Vol.15, No.3, 2022), 90.

Negara dilakukan berbasis elektronik. Selain Integrasi Database, keunggulan SAKTI lainnya adalah *Single Entry Point*, yaitu suatu transaksi cukup sekali diinput dan apabila dibutuhkan oleh modul terkait data tersebut akan dipanggil tanpa harus dilakukan penginputan ulang oleh modul yang membutuhkan. Dalam SAKTI juga digunakan konsep *maker*, *checker* dan *approver* sehingga seluruh transaksi telah melalui proses bertahap untuk menghindari penyalahgunaan.

Latar belakang implementasi SAKTI Full Modul pada laporan pertanggungjawaban satuan kerja di KPPN Palu bisa bervariasi tergantung pada konteks dan tujuan organisasi. Hal tersebut lah yang secara umum harus diteliti namun secara umum, ada beberapa alasan yang mungkin mendasari keputusan untuk mengimplementasikan SAKTI Full Modul dalam proses pelaporan pertanggungjawaban di KPPN Palu. **Meningkatkan Efisiensi dan Akurasi** Implementasi SAKTI Full Modul dapat membantu mengotomatisasi sejumlah proses akuntansi dan pelaporan. Ini dapat mengurangi ketergantungan pada entri data manual, mengurangi peluang kesalahan manusia, dan meningkatkan akurasi laporan keuangan.³

Integrasi Data Terpadu Sakti memungkinkan integrasi data dari berbagai sumber, termasuk sistem subordinat dan aplikasi terkait lainnya. Ini memungkinkan data keuangan dan operasional yang relevan dapat diakses dengan lebih mudah dan digunakan dalam proses pelaporan. **Kepatuhan dengan Regulasi**, Sakti dirancang dengan memperhatikan pedoman dan regulasi yang berlaku dalam pelaporan keuangan pemerintah. Dengan mengadopsi SAKTI Full Modul, KPPN Palu dapat lebih mudah memenuhi persyaratan pelaporan yang ditetapkan oleh pihak berwenang.⁴

Meningkatkan transparansi dengan mengintegrasikan data dari berbagai sumber, Sistem aplikasi keuangan Tingkat instansi (SAKTI) dapat membantu meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan dan operasional. Hal ini dapat membantu pihak internal dan eksternal untuk

³Ahmad Inzil Anwar, Miftahul Hadi. Implementasi Aplikasi Sakti San Span Dalam Penyusunan Laporan Keuangan, *Jurnal Informatika*. No. 2, (2022), 33.

⁴*Ibid*, 37.

mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kinerja dan kondisi keuangan satuan kerja.⁵ **Mempercepat proses keputusan**, dengan data yang terintegrasi dan akurat tersedia, proses pengambilan keputusan di KPPN Palu dapat dipercepat, informasi yang lebih baik dan lebih cepat dapat membantu manajemen dalam membuat keputusan yang lebih informasional dan tepat waktu.

Mengurangi Biaya Jangka Panjang, Meskipun implementasi awal mungkin memerlukan investasi dalam hal waktu, sumber daya, dan pelatihan, penggunaan SAKTI Full Modul dalam jangka panjang dapat membantu mengurangi biaya operasional dengan mengurangi kegiatan manual dan potensial pengurangan kesalahan. **Penyediaan layanan yang lebih baik**, dengan data yang lebih terstruktur dan terintegrasi, KPPN Palu dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada pihak-pihak yang memerlukan informasi keuangan dan pelaporan yang relevan. Aplikasi SAKTI dijadwalkan untuk diimplementasikan secara penuh oleh seluruh K/L dan satker yang bertugas sebagai unit pengelola APBN pada tahun 2022. KPPN Palu, sebagai bagian dari persiapan implementasi tersebut, telah melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kompetensi SDM satker. Kegiatan ini mencakup sosialisasi, publikasi, dan pelatihan yang diselenggarakan untuk seluruh satker di wilayah kerja KPPN Palu.⁶

Namun, dalam persiapan menuju implementasi Sistem aplikasi keuangan Tingkat instansi SAKTI, beberapa kendala muncul yang dapat menjadi hambatan signifikan. Salah satu kendala utama adalah terkait pelaksanaan training yang kurang optimal, terutama sejak adanya pandemi *Covid-19*, KPPN Palu beralih dari kegiatan tatap muka menjadi kegiatan video *conference* menggunakan aplikasi Zoom, termasuk sosialisasi dan bimtek dalam persiapan implementasi SAKTI. Pelaksanaan sosialisasi dan bimtek secara *daring* membawa sejumlah kelebihan, seperti fleksibilitas partisipasi dari lokasi manapun dan efisiensi biaya. Namun, juga terdapat kelemahan, seperti kurangnya fokus peserta dan tingkat partisipasi yang rendah, serta kebosanan potensial terhadap kegiatan video *conference*. Beberapa satker bahkan mengusulkan agar sosialisasi dilakukan secara offline, merasa bahwa cara ini lebih mudah dipahami.

⁵Robert D. Jr. Lee, dan Ronald W. Johnson, *Public Budgeting Systems*, (Sixth edition; Gaithersburg Maryland: Aspen Publishers, Inc, 1998), 37.

⁶*Ibid*, 40

Masalah aksesibilitas fisik juga menjadi perhatian, terutama bagi satker yang terletak di wilayah terpencil, seperti kabupaten Simeulue. Jarak yang jauh dan keterbatasan sarana transportasi dan dana transportasi menyulitkan satker untuk mengikuti kegiatan langsung yang diadakan KPPN Palu. Permasalahan SDM satker, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, juga muncul sebagai faktor penghambat. Beberapa satker memiliki sedikit orang pada bagian keuangan, mengakibatkan satu orang petugas satker memegang seluruh aplikasi, yang dapat mengganggu operasional satker jika pegawai tersebut mengalami kendala. Selain itu, ketergantungan aplikasi SAKTI pada jaringan internet juga menjadi isu serius. Meskipun tidak menjadi masalah di kota-kota dengan infrastruktur internet yang memadai, wilayah-wilayah tertentu menghadapi kesulitan karena jaringan yang tidak stabil. Untuk mengatasi hal ini, telah dilakukan upaya berupa bantuan jaringan internet bagi satker di daerah terpencil.⁷

Kelebihan aplikasi SAKTI, seperti keamanan transaksi melalui OTP, menjadi nilai tambah, tetapi seiring dengan kebutuhan jaringan internet yang stabil. Kesadaran terhadap kendala-kendala ini membawa kebutuhan untuk melakukan mitigasi risiko secara efektif agar implementasi SAKTI berjalan lancar pada tahun 2024 mendatang. Dengan SAKTI yang berjalan optimal, diharapkan seluruh proses pengelolaan keuangan negara dapat menjadi lebih mudah, efisien, dan transparan, mendukung penyusunan kebijakan serta pengambilan keputusan yang lebih baik.

B. Rumusan Masalah

Untuk membuat permasalahan semakain spesifik dan sesuai dengan titik tekan kajian, Maka harus ada rumusan masalah yang benar-benar fokus. Dalam hal ini penulis lebih mengfokuskan Implementasi Sakti Full Modul pada Laporan Pertanggungjawaban Satuan Kerja di KPPN Palu. Hal dimaksud agar pembahasan tidak melebar dari yang dikehendaki, dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, Maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

⁷James Brown, “Peran KPPN dalam Pengelolaan Keuangan Daerah”, (Jurnal Keuangan Pemerintahan Lokal, 2018), 57.

1. Bagaimana Implementasi SAKTI Full Modul pada Laporan Pertanggungjawaban di KPPN Palu?
2. Apakah tantangan teknis yang dihadapi dalam mengimplementasikan SAKTI full modul pada laporan pertanggungjawaban di KPPN Palu?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Kegiatan menyusun karya ilmiah tentu terdapat tujuan yang ingin dicapai serta kegunaan yang hendak di dapatkan atau dirasakan manfaatnya, begitu pula dengan penelitian ini, tujuan dan kegunaan secara sistematis dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian

Dengan mengacu pada permasalahan di atas dan agar memperoleh hasil yang di inginkan serta apa yang akan dilakukan lebih tertera maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi SAKTI full modul pada laporan pertanggungjawaban di KPPN Palu;
- b. Untuk mengetahui apakah tantangan teknis yang dihadapi dalam mengimplementasikan SAKTI full modul pada laporan pertanggung jawaban di KPPN Palu;
- c. Untuk mengetahui bagaimana dampak penggunaan SAKTI full modul terhadap efisiensi dan akurasi pelaporan pertanggung jawaban di KPPN Palu.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian merupakan nilai dari yang dihasilkan dalam penelitian dan dapat dirasakan langsung oleh berbagai pihak adapun kegunaan dari penelitian ini baik secara akademis maupun praktis adalah:

- a. Secara Teoritis, dapat digunakan sebagai sumbangan tertulis berupa informasi ilmiah untuk implementasi sakti full modul pada laporan pertanggung jawaban satuan kerja di kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN);
- b. Secara Praktis, dapat menambah wawasan mengenai Implementasi Sakti Full Modul pada Laporan Pertanggungjawaban Satuan Kerja di KPPN Palu.

D. Penegasan Istilah

Agar pembaca bisa memahami konsep yang dimaksud oleh penulis, maka penulis memberikan penjelasan untuk menghindari kesalahpahaman pembaca terhadap judul tersebut dengan memberikan penegasan istilah berikut:

1. Implementasi

Implementasi merujuk pada proses penerapan atau pelaksanaan suatu sistem, konsep, atau teknologi dalam lingkungan kerja nyata. Dalam konteks ini, implementasi mengacu pada penerapan sistem SAKTI Full Modul dalam proses pelaporan pertanggung jawaban satuan kerja di KPPN Palu.

2. SAKTI Full Modul

Sakti (Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Terintegrasi) adalah sistem yang digunakan dalam pemerintahan Indonesia untuk mengintegrasikan akuntansi dan pelaporan keuangan. "Full Modul" menunjukkan bahwa semua aspek atau modul dalam SAKTI digunakan, mencakup berbagai fitur yang diperlukan untuk manajemen keuangan dan pembuatan modul pembayaran.

3. Laporan Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban adalah dokumen yang menyajikan informasi mengenai pengeluaran, penerimaan, dan posisi keuangan suatu entitas atau satuan kerja dalam suatu periode tertentu. Laporan ini memberikan gambaran tentang bagaimana dana dan aset negara dikelola.

4. Satuan Kerja

Satuan kerja (satker) adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang

melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program. Satuan kerja dibentuk untuk menyelenggarakan fungsi tertentu pemerintahan di satuan kerja kementerian Agama kota palu.

5. KPPN Palu

KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) adalah unit yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan negara di daerah tertentu. "KPPN Palu" merujuk pada KPPN yang terletak di Jl. Tanjung Dako Kota Palu.

E. Garis-garis Besar Isi

Untuk mempermudah bagi pembaca tentang pembahasan proposal penelitian ini, maka penulis menganalisa secara garis besar menurut ketentuan yang ada di dalam komposisi proposal penelitian ini. Rangkaian penulisan proposal penelitian ini garis besar isinya penulis paparkan secara sistematis ke dalam tiga bab berturut-turut sebagai berikut.

Bab I merupakan bab pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah dan garis-garis besar isi.

Bab II yang berupa kajian pustaka dan menguraikan serta menjelaskan tentang penelitian terdahulu, kajian teori dan kerangka pemikiran.

Bab III, yaitu mengenai metode penelitian yang membahas tentang pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV Hasil Dan Pembahasan, bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan permasalahan yang dikaji dan diangkat sebelumnya, yang merupakan hasil wawancara dan keterangan yang penulis lakukan bersama narasumber

Bab V Penutup, pada bab ini ialah merupakan penutup dari seluruh rangkaian isi skripsi yang menyajikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah di lakukan

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Lembaga Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palu

1. Sejarah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palu

kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) Palu adalah salah satu unit kerja dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang bertugas mengelola dan mengawasi pelaksanaan anggaran negara di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) Palu memiliki peran penting dalam memastikan aliran dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dilaksanakan dengan baik di daerah tersebut. dimulai dengan dibentuknya Kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) Palu di seluruh Indonesia sebagai bagian dari upaya untuk memperbaiki pengelolaan keuangan negara. Kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) Palu sendiri mulai beroperasi pada tahun 2002, setelah adanya pembentukan Kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) di berbagai daerah untuk mendekatkan layanan perbendaharaan dengan instansi pemerintah di wilayah masing-masing. Kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) Palu tidak hanya bertanggungjawab untuk memastikan kelancaran transaksi perbendaharaan, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara di tingkat daerah, serta memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan akuntabel kepada para pengguna anggaran, baik itu kementerian, lembaga, maupun instansi pemerintah daerah.⁸

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palu merupakan instansi vertikal yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi

⁸Kantor pelayanan perbendaharaan negara kota Palu, "sejarah kppn palu"
<https://dijpb.kemenkeu.go.id/kppn/palu/id/> (Tanggal 3 Desember 2024).

Sulawesi Tengah. Pada awalnya Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palu bernama Kantor Bendahara Negara (KBN) yang dibentuk pada tanggal 1 Oktober 1965. Pada 12 Juni 1976 Kantor Bendahara Negara Palu mengalami perubahan dan struktur organisasi dipecah menjadi tiga unit kerja yaitu:

- a. Kantor Perbendaharaan Negara (KPN)
- b. Kantor Kas Negara (KKN)
- c. Satuan Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran yang berada di daerah.

Pada awal mulanya Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palu bernama Kantor Bendahara Negara (KBN) yang dibentuk pada tanggal 1 Oktober 1965 dengan 7 (tujuh) pegawai. Pimpinan sementara dijabat oleh Bapak Sahertian sampai dengan tanggal 18 Oktober 1965. Selanjutnya diserahkan kepada Bapak Dj. Ratulangi sebagai Kepala Kantor Definitive dengan komposisi pegawai yang terdiri dari:

- a. Bapak Dj.Ratulangi sebagai Kepala KBN
- b. Bapak Ali Soeman, BA sebagai Kepala Urusan Umum.
- c. Bapak Burhan Bachmit sebagai Kepala Urusan Pemeriksaan dan Pembukuan.
- d. Bapak Soetanto Moelyatmojo sebagai Kepala Urusan Kas.
- e. Bapak J.Marengko sebagai Kepala Urusan Pembiayaan.

Pada tanggal 12 Juni 1976 Kantor Bendahara Negara Palu mengalami perubahan dan struktur organisasi dipecah menjadi tiga unit kerja yaitu Kantor Perbendaharaan Negara (KPN), Kantor Kas Negara (KKN), dan satuan Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran yang berada di daerah. Tanggal 20 Juni 1976 Kepala KPN Palu dijabat oleh Bapak Sambasudin Usman, BC.KN, alamat kantor terletak di Jalan Pramuka dan KKN Palu dijabat oleh Bapak Drs.Wahyudi serta satuan Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran Palu yang dijabat oleh Bapak J.U.Tambun.⁹

⁹Ibid.

Perbendaharaan Negara Palu yang beralamat di Jalan Tanjung Dako No.11 diresmikan oleh Sekretaris Dirjen Anggaran yaitu Bapak H. Imam Rusdi, dan pada waktu itu Kantor Perbendaharaan Negara Palu dikepalai oleh Bapak Drs. R. Wiyatno.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No.645/KMK.01/1990 tanggal 1 April 1990 KKN dan KPN Palu di gabung menjadi Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) type C dan Kepala Kantornya di jabat oleh Drs.Nahid Hudaya, MA. Pada tanggal 1 Juni 1990, KPKN Palu ditingkatkan tipenya menjadi tipe B, kemudian sesuai Keputusan Menteri Keuangan RI No.442/KMK.01/2001 tanggal 23 juli 2001 di tingkatkan kembali menjadi tipe A dan Kepala Kantornya dijabat ole Bapak Drs. M.L. Mamahit. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/Pmk.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, tugas dan wewenang bendahara pengeluaran atas uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya meliputi:

- a. Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;
- b. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
- c. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
- d. Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya;
- e. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
- f. Mengelola rekening tempat penyimpanan UP; dan
- g. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala Kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) selaku kuasa Bendahara umum Negara BUN.¹⁰

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan RI No.303/KMK.01/2004 tanggal 23 Juni 2004 tentang perubahan nama Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Palu (KPKN Palu) menjadi Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Palu (KPPN Palu), dan Kepala Kantornya dijabat

¹⁰Ibid.

oleh Bapak Drs.R.Heru Wahyudi. Seiring dengan bergulirnya reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, maka Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palu pada Januari 2008 ditetapkan sebagai KPPN Percontohan Tahap II dan sejak saat itu melaksanakan Prosedur Standard Operasioanl (SOP) KPPN Percontohan, yaitu memberikan pelayanan prima kepada stakeholders dengan prinsip:

- a. Pelayanan satu tempat (*One Stop Service*)
- b. Bisnis proses yang sederhana
- c. Pemanfaatan teknologi secara optimal
- d. Memberikan informasi secara *real time*
- e. Cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel dan tanpa biaya.

2. Visi Misi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Palu (KPPN)

a. Visi :

“Menjadi pengelola perbendaharaan negara di daerah yang profesional, modern, transparan, dan akuntabel”.

b. Misi :

- 1) Menjamin kelancaran pencairan dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) secara tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah;
- 2) Mengelola penerimaan negara secara profesional dan akuntabel;
- 3) Mewujudkan pelaporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang akurat dan tepat waktu¹¹

3. Struktur Organisasi

Struktur merupakan salah satu konsep fundamental dalam berbagai bidang, termasuk arsitektur, ilmu kimia, matematika, dan bahkan dalam konteks yang lebih dekat dengan kita, seperti penulisan dan organisasi dalam kehidupan sehari-hari. struktur merujuk pada kerangka,

¹¹Ibid

tata letak, atau susunan suatu entitas. Entitas ini bisa berupa benda fisik, seperti bangunan atau molekul, maupun konsep abstrak, seperti teks atau data.¹²



4. Nama-nama satuan kerja (Satker) yang

mendapatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah entitas organisasi pemerintah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program atau kegiatan yang didanai oleh APBN. Secara umum, Satker ini mencakup berbagai institusi pemerintah pusat dan daerah, serta lembaga terkait lainnya.

Anggaran yang diterima oleh Satker dikelola berdasarkan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yang disetujui oleh Kementerian Keuangan. Pengawasan penggunaan dana dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan aparat pengawas internal pemerintah. Berikut nama-nama satuan kerja yang mendapatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu.

Tabel 4.1

¹²Sigit Harjanto, Kepala Lembaga KPPN Palu, *Wawancara* di Kantor Lembaga KPPN Palu, 17 Mei 2024.

Nama-Nama Kantor dan Lembaga

NO	Nama-nama kantor dan lembaga
1.	Pemerintahan kota palu
2.	Badan perencanaan pembangun daerah (Bappeda) kota palu
3.	Dinas Pendidikan dan kebudayaan kota palu
4.	Dinas Kesehatan Kota Palu
5.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palu
6.	Dinas Sosial Kota Palu
7.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu
8.	Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Sulawesi Tengah
9.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Tengah
10.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
11.	Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tengah
12.	Balai Wilayah Sungai Sulawesi III (di bawah Kementerian PUPR)
13.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), yang bekerja sama dengan BNPB pusat untuk penanggulangan bencana.
14.	Polda Sulawesi Tengah
15.	Komando Distrik Militer (Kodim) 1306/Donggala
16.	Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah
17.	Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Palu
18.	Universitas Tadulako (Untad):
19.	Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Madani
20.	Universitas islam negri datokarama palu

21.	RSUD Undata Palu: Biasanya dikelola dengan dukungan APBN melalui Kementerian Kesehatan.
22.	Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP)
23.	Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tengah
24.	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tengah
25.	Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palu
26.	Kantor Imigrasi Kelas I Palu
27.	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palu
28.	PLN (melalui proyek pembangkit dan distribusi listrik)
29.	PT Pelindo (pelabuhan di Pantoloan)
30.	PT PNM (Permodalan Nasional Madani)

***B. Implementasi SAKTI Full Modul Pada Laporan Pertanggungjawaban di Satuan Kerja
Kementerian Agama Kota Palu***

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palu adalah kuasa bendahara umum negara untuk menyalurkan dana dari kas negara ke beberapa satuan kerja di bawah kementerian/lembaga lain ataupun di bawah kementerian keuangan sendiri. Secara struktural Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palu bekerja di bawah direktorat jenderal perbendaharaan kementerian keuangan, tetapi bertanggung jawab langsung kepada Kepala kantor wilayah. Secara umum tugas KPPN ini sangat penting, karena bertanggung jawab untuk menjadi wakil bendahara umum dalam menyalurkan dan membebaskan biaya apapun yang ada di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada instansi pemerintah. Dasar hukum penggunaan aplikasi SAKTI diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara: Pasal 7 ayat (2) huruf a dan d menyatakan bahwa Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara

berwenang menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara, serta sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara.¹³

Dengan adanya dasar hukum tersebut, penggunaan aplikasi SAKTI menjadi wajib bagi instansi pemerintah dalam mengelola keuangan negara secara transparan dan akuntabel.

Tugas pokok Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah melakukan pencairan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), di mana anggaran tersebut sudah tertuang di dalam dokumen pelaksana anggaran DIPA (Daftar Isian Pelaksana Anggaran). Artinya dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) adalah tugas pemerintah, dana tersebut disalurkan ke daerah melalui satuan kerja (satker) vertikal masing-masing kementerian. Dalam hal ini beberapa hasil wawancara yang telah kami teliti salah satunya pernyataan yang kami kemukakan bersama bapak Shodik Abdul Aziz yaitu.¹⁴ Jadi penggunaan aplikasi sakti full modul di kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) sudah digunakan sejak tahun 2015 hingga sekarang.

Modul pembayaran adalah suatu sistem atau komponen perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola dan memproses transaksi pembayaran, baik secara online maupun offline. Modul ini menjadi bagian penting dalam berbagai sistem keuangan, seperti aplikasi e-commerce, marketplace, lembaga keuangan, dan layanan lainnya yang memerlukan transaksi uang antara pengguna atau pelanggan dan penyedia layanan. Modul Pembayaran juga salah satu modul dalam Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang digunakan untuk memproses pembuatan berbagai dokumen terkait pembayaran:

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
2. Surat Perintah Membayar (SPM)
3. Surat Perintah Pencarian Dana (SPPD) dari KPPN
4. Perencanaan Kas (Renkas)

¹³ Menteri Keuangan Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti” Dalam Benny Riyanto, *Perpajakan Indonesia* (Jakarta, 2021), 9.

¹⁴Ibid.

5. Surat Perintah Bayar (SPBy)
6. Prakiraan Pencairan Dana Harian (PPDH)
7. Resume Tagihan (SPP)

Peneliti melakukan wawancara bersama bapak Shodik Abdul Aziz mengenai bagaimana keadaan terkait pelaporan pertanggungjawaban di KPPN Palu.

Terkait dengan keadaan laporan pertanggungjawaban di Kantor KPPN Palu ini sudah terbilang sesuai dengan prosedurnya, dengan bantuan aplikasi dan kerja sama yang baik di Kantor KPPN Palu ini, sehingga satuan kerja yang menggunakan aplikasi sakti full modul bisa digunakan dengan sebaik mungkin.¹⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat kita ketahui bahwa terkait laporan pertanggungjawaban di kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) Palu sudah terbilang sesuai dengan prosedurnya, dengan adanya bantuan aplikasi dan adanya kerja sama yang baik dalam suatu kantor tersebut. Perlu juga kita ketahui bahwa dengan canggihnya teknologi dan aplikasi sekarang ini bisa membantu kita dalam menyelesaikan laporan-laporan yang ada di kantor kita termasuk laporan pertanggungjawaban yang ada di kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) Palu.

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai konteks, baik itu dalam organisasi, pemerintahan, perusahaan, maupun komunitas. Berikut adalah beberapa alasan mengapa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) itu penting karena Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) menjadi sarana untuk menunjukkan bagaimana kegiatan atau proyek dijalankan, terutama dalam hal penggunaan anggaran. Ini membantu mencegah adanya dugaan penyalahgunaan dana dan memastikan bahwa semua pihak mengetahui alokasi yang telah dilakukan. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) juga sebagai alat yang sangat penting untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan pembelajaran dalam pelaksanaan kegiatan. Tanpa

¹⁵Shodik Abdul Aziz, Staf PTPN, *Wawancara* di Kantor Lembaga KPPN Palu, 17 Mei 2024.

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), keberlanjutan kegiatan dan kepercayaan dari berbagai pihak bisa terancam. Kemudian peneliti juga melakukan wawancara bersama Shodik Abdul Aziz yaitu.

“Mengenai aplikasi-aplikasi apa saja yang digunakan di KPPN Palu ini yaitu kita hanya menggunakan satu aplikasi saja dalam pembuatan pelaporan pertanggungjawaban yang dimana kita hanya menggunakan aplikasi sakti full modul. Jadi dengan adanya aplikasi ini kita sangat terbantu dalam pembuatan pelaporan pertanggungjawaban, kemudian bukan hanya terbantu dalam hal pembuatan pelaporan tadi tetapi kita juga terbantu dalam hal seperti perencanaan anggaran dan pencairan dana. dengan adanya aplikasi pelaporan-pelaporan yang kita buat bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan sebagaimana mestinya.”¹⁶

Dari hasil wawancara di atas dapat kita ketahui juga bahwa aplikasi yang digunakan di kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) Palu menggunakan aplikasi sakti full modul karena aplikasi tersebut sangat membantu dalam penyelesaian pelaporan pertanggungjawaban, kemudian bukan hanya itu kegunaan dari aplikasi tersebut tetapi bisa juga digunakan untuk perencanaan anggaran dan pencairan dana.

Aplikasi canggih adalah alat yang sangat penting di era modern. Mereka tidak hanya membantu menghemat waktu dan tenaga, tetapi juga mendorong kreativitas, meningkatkan produktivitas, dan mempermudah akses ke informasi. Dalam dunia yang semakin terhubung, aplikasi canggih menjadi kebutuhan untuk mendukung kehidupan yang lebih efisien dan produktif, aplikasi canggih memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan karena mampu meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kenyamanan dalam melakukan berbagai aktivitas, Aplikasi canggih bukan hanya pelengkap, tetapi kebutuhan esensial di era modern. Mereka mendukung efisiensi, inovasi, dan aksesibilitas di berbagai sektor kehidupan. Dengan keberadaan aplikasi ini, manusia dapat

¹⁶ Shodik Abdul Aziz, Staf PTPN, *Wawancara* di Kantor Lembaga KPPN Palu, 17 Mei 2024.

beradaptasi dengan perubahan zaman, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan kehidupan yang lebih baik.

Dikantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), berbagai aplikasi canggih digunakan untuk mendukung pengelolaan keuangan negara, memastikan transparansi, dan meningkatkan efisiensi kerja. Aplikasi-aplikasi canggih yang digunakan di kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) tidak hanya meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, tetapi juga mendukung pelayanan publik yang lebih baik. Digitalisasi melalui aplikasi ini memastikan akuntabilitas yang tinggi dalam setiap proses administrasi keuangan.

“mengenai tanggapan saya terkait aplikasi sakti full modul ini yaitu menurut saya sangat-sangat membantu dalam suatu instansi yang menggunakan aplikasi ini karena menurut saya fitur-fitur yang digunakan cukup mudah dipahami sehingga penggunaannya bisa cepat dipahami.”¹⁷

Dapat kita ketahui bahwa aplikasi sistem keuangan tingkat instansi (SAKTI) full modul ini sangat membantu dalam suatu instansi yang menggunakan aplikasi sistem aplikasi keuangan tingkat instansi (SAKTI) full modul karna menurut saya fitur-fitur yang digunakan cukup mudah dipahami sehingga penggunaannya bisa cepat dipahami.

Aplikasi sakti full modul merupakan langkah strategis yang diambil oleh Kementerian Keuangan untuk menyederhanakan dan mengintegrasikan pengelolaan keuangan negara di tingkat satuan kerja (satker). Keunggulan aplikasi sakti full modul

1. Integrasi Data yang Komprehensif

¹⁷Shodik Abdul Aziz, Staf PTPN, *Wawancara* di Kantor Lembaga KPPN Palu, 17 Mei 2024.

- a. sistem aplikasi keuangan tingkat instansi (SAKTI) mengintegrasikan berbagai aplikasi keuangan satker, seperti SAS, SIMAK-BMN, Persediaan, dan lainnya, ke dalam satu sistem terpadu.
 - b. Dengan integrasi ini, pengelolaan data menjadi lebih efisien dan akurat, mengurangi risiko kesalahan akibat input data manual.
2. Kemudahan dalam Pengelolaan Keuangan
- a. Full modul mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan.
 - b. Mempermudah satker dalam menyusun RKA-K/L, pengajuan SPM, dan pelaporan keuangan secara elektronik.
3. Efisiensi dan Transparansi
- a. Sistem yang terpusat memastikan semua pihak memiliki akses real-time terhadap data yang diperlukan, meningkatkan transparansi.
 - b. Menghemat waktu karena satker tidak perlu menggunakan beberapa aplikasi yang terpisah.
4. Mendukung Reformasi Birokrasi
- a. sistem aplikasi keuangan tingkat instansi (SAKTI) Full Modul menjadi bagian dari upaya modernisasi sistem keuangan negara.
 - b. Meningkatkan akuntabilitas dan mempermudah monitoring pelaksanaan anggaran.
5. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan
- a. Sistem aplikasi keuangan tingkat instansi (SAKTI) dirancang untuk mematuhi peraturan yang berlaku, termasuk Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Peneliti juga masih melakukan wawancara bersama pak Shodik Abdul Aziz yaitu.

“Jadi untuk proses pengimplementasian aplikasi sakti full modul di setiap satuan kerja itu diadakannya pelatihan dan mengundang setiap satuan kerja yang menggunakan aplikasi

saktiful modul, dan pelatihan aplikasi Sakti Full Modul sudah pasti kita membuat pelatihan yang terstruktur pelatihan yang dimana biasanya meliputi sesi pengenalan dasar, simulasi penggunaan modul serta latihan praktek secara langsung dengan skenario kerja yang dihadapi di lapangan, dan juga dilakukan pendampingan selama implementasi, perlu kita ketahui juga bahwa aplikasi ini memerlukan pemahaman yang kuat dan ketelitian yang dibutuhkan dalam penerapannya, kemudian pada proses tersebut Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) melibatkan berbagai instansi yang mendapatkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), dengan adanya pelatihan ini setiap satuan kerja bisa memahami mengenai manfaat, tujuan dan cara kerja sistem aplikasi keuangan tingkat instansi (Sakti) Full Modul”.¹⁸

Berdasarkan kesimpulan di atas yaitu Sosialisasi yang dilakukan bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar kepada seluruh staf mengenai manfaat, tujuan dan cara kerja sistem aplikasi keuangan tingkat instansi (SAKTI) FULL MODUL. Sosialisasi sering kali melibatkan pertemuan berkala untuk diskusi dan pemahaman bersama. Dalam beberapa kasus, pendampingan khusus diberikan kepada unit atau individu yang membutuhkan bantuan tambahan. Tim teknis atau konsultan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi (SAKTI) akan mendampingi secara langsung untuk memastikan kelancaran dalam penerapan setiap fungsi modul. Selain pelatihan tatap muka, tersedia juga materi pembelajaran online yang bisa diakses kapan saja berguna untuk menjangkau staf yang tidak bisa hadir secara fisik dan memperluas akses terhadap informasi terkait implementasi sistem aplikasi keuangan tingkat instansi (SAKTI).

Pengimplementasian sistem aplikasi keuangan tingkat instansi (SAKTI) Full Modul adalah langkah besar menuju digitalisasi pengelolaan keuangan negara. Meski menghadapi tantangan, dengan persiapan matang dan dukungan dari semua pihak, aplikasi ini dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara. Keberhasilan implementasi aplikasi sistem aplikasi keuangan tingkat instansi (SAKTI) memerlukan dukungan

¹⁸Shodik Abdul Aziz, Staf PTPN, *Wawancara* di Kantor Lembaga KPPN Palu, 17 Mei 2024.

penuh dari pimpinan kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) dan satker. Pimpinan harus aktif dalam mengawasi dan mendorong penggunaan aplikasi serta menyediakan sumber daya yang diperlukan.

Pengimplementasian sistem aplikasi keuangan tingkat instansi (SAKTI) Full Modul yang baik memerlukan perencanaan yang matang, pelatihan yang efektif, dukungan infrastruktur yang memadai, serta pemantauan yang berkelanjutan. Implementasi bertahap, evaluasi, dan peningkatan berkelanjutan adalah kunci untuk memastikan aplikasi berjalan dengan lancar dan memberi dampak positif pada pengelolaan keuangan negara. Keberhasilan implementasi ini akan membawa manfaat besar, seperti efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara¹⁹.

langkah-langkah aplikasi sakti full modul dalam menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan di kppn palu, yaitu.

a. Login ke Aplikasi sistem aplikasi keuangan tingkat instansi (SAKTI)

- 1) Akses Aplikasi: Buka aplikasi sistem aplikasi keuangan tingkat instansi (SAKTI) dan masuk menggunakan akun yang telah terdaftar.
- 2) Pilih Modul: Setelah berhasil login, pilih modul Perbendaharaan atau Anggaran sesuai dengan kebutuhan pembuatan LPJ.

b. Pengumpulan Data dan Dokumen Pendukung

- 1) Kumpulkan Bukti Pengeluaran: Pastikan semua bukti pengeluaran seperti kuitansi, nota, faktur, dan dokumen lainnya sudah terkumpul dan disusun dengan rapi.

¹⁹Mentri Keuangan, "Teknis Penggunaan Aplikasi Sakti,"
<https://jdih.kemenkeu.go.id/> Penilaian Kompetensi PPK dan PPSPM (21 Januari 2025)

- 2) Dokumen Lainnya: Sertakan dokumen lain yang diperlukan, seperti surat tugas, surat perintah kerja, dan sebagainya.

c. Input Data di Modul SAKTI

- 1) Pilih Jenis LPJ: Pada modul yang sesuai, pilih jenis LPJ yang ingin dibuat (misalnya LPJ Gaji, LPJ Perjalanan Dinas, dll.).
- 2) Masukkan Data Transaksi: Input data terkait transaksi ke dalam sistem sesuai dengan dokumen pendukung yang sudah disiapkan.
- 3) Upload Dokumen: Upload dokumen pendukung yang sudah dipindai (scan) ke dalam sistem sebagai bukti transaksi.

d. Verifikasi dan Validasi Data

- 1) Validasi: Setelah data dianggap benar, lakukan validasi di sistem. Beberapa instansi mungkin memerlukan persetujuan dari atasan atau bagian keuangan sebelum LPJ bisa diselesaikan.

e. Proses Penyusunan LPJ

- 1) Generate Laporan: Gunakan fitur di sistem aplikasi keuangan tingkat instansi (SAKTI) untuk menghasilkan LPJ berdasarkan data yang sudah diinput.
- 2) Review Laporan: Periksa kembali laporan yang dihasilkan untuk memastikan semua data sudah benar dan sesuai.

f. Pengajuan dan Persetujuan LPJ

- 1) Ajukan LPJ: Setelah laporan dirasa sudah lengkap dan benar, ajukan LPJ untuk disetujui oleh pejabat yang berwenang.
- 2) Persetujuan: Tunggu proses persetujuan. Jika LPJ disetujui, laporan tersebut akan dianggap final dan siap untuk disimpan atau dikirim sesuai dengan prosedur instansi.

3) Penyimpanan dan Dokumentasi

- a) Simpan LPJ: Simpan LPJ yang sudah disetujui di sistem dan dokumentasikan secara fisik jika diperlukan.
- b) Arsipkan Dokumen: Pastikan semua dokumen pendukung yang digunakan dalam LPJ diarsipkan dengan baik untuk keperluan audit atau pemeriksaan di masa mendatang.

g. Pengiriman LPJ

- 1) Kirim LPJ: Kirim LPJ yang sudah disetujui ke pihak yang membutuhkan, seperti Kementerian Keuangan atau instansi lain yang terkait, jika diperlukan.²⁰

Melihat dari langka-langkah aplikasi sakti full modul dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan di Kppn Palu, dapat kita tarik kesimpulan bahwa pembuatan laporan pertanggung jawaban keuangan di kppn palu ini suda ada alur khusus yang di terapkan di kppn palu sehingгаа dalam pembuatan laporan pertanggung jawaban keuangan ini tidak rancu lagi alurnya.

keberhasilan implementasi sistem aplikasi keuangan tingkat instansi (SAKTI) Full Modul bergantung pada kesiapan infrastruktur, pelatihan yang memadai bagi pegawai, dan dukungan dari pimpinan serta stakeholders terkait. Keberlanjutan pemeliharaan dan peningkatan aplikasi juga penting untuk menjaga kinerja sistem. Dengan pengelolaan yang tepat, aplikasi ini akan membawa perubahan positif dalam tata kelola keuangan negara, memastikan bahwa anggaran digunakan secara efisien dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

²⁰Shodik Abdul Aziz, Staf PTPN, *Wawancara* di Kantor Lembaga KPPN Palu, 17 Mei 2024

Pentingnya langkah-langkah implementasi sistem aplikasi keuangan tingkat instansi (SAKTI) Full Modul terletak pada bagaimana setiap tahap penggunaan sistem dapat memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara di Kementerian dan Lembaga (K/L), termasuk Kementerian Agama, berjalan dengan efisien, transparan, dan sesuai²¹ dengan peraturan yang berlaku. Setiap langkah yang dilakukan dalam penggunaan aplikasi SAKTI Full Modul memiliki peran penting untuk mencapainya.

Langkah-langkah yang jelas dalam implementasi sistem aplikasi keuangan tingkat instansi (SAKTI) Full Modul membantu memastikan bahwa semua tahap berjalan dengan lancar, mulai dari persiapan awal hingga pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Setiap langkah yang dilakukan dengan hati-hati dan terstruktur memungkinkan sistem dapat berfungsi secara optimal, dengan minimalisasi masalah atau kendala teknis. Hal ini sangat penting untuk mencegah gangguan yang dapat menghambat operasional pengelolaan keuangan.

Langkah-langkah penggunaan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi (SAKTI) Full Modul juga mendukung tujuan reformasi birokrasi, dengan mengurangi beban kerja manual, mempercepat proses administrasi, dan meningkatkan pelayanan publik. Sistem ini menyederhanakan prosedur yang sebelumnya rumit, mengurangi ketergantungan pada pengelolaan keuangan berbasis kertas, dan memperkenalkan teknologi sebagai bagian dari peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Proses yang berjalan terstruktur dan berbasis data yang jelas dan akurat memungkinkan pengambil keputusan di Kementerian Agama dan K/L lainnya untuk mendapatkan informasi yang lebih cepat dan tepat. Langkah-langkah yang jelas dalam menggunakan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi (SAKTI) Full Modul memberikan gambaran yang jelas tentang posisi keuangan,

²¹ Pelaksanaan aplikasi SAKTI terintegrasi dengan SIMSPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) untuk sinkronisasi data keuangan.

status anggaran, dan penggunaan dana, yang sangat penting untuk membuat keputusan yang cepat dan tepat dalam pengelolaan anggaran.²²

Langkah-langkah implementasi dan penggunaan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi (SAKTI) Full Modul sangat penting untuk keberhasilan pengelolaan keuangan negara, baik di Kementerian Agama maupun kementerian/lembaga lainnya. Langkah-langkah yang terstruktur dan terintegrasi memungkinkan pengelolaan anggaran yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Selain itu, hal ini juga mendukung proses audit yang lebih mudah, pengawasan yang lebih efektif, serta pengambilan keputusan yang lebih tepat berdasarkan data yang akurat.

Dengan langkah-langkah yang tepat, sistem aplikasi keuangan tingkat instansi (SAKTI) Full Modul akan membantu memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara dilakukan dengan baik, sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Peneliti melakukan wawancara bersama ibu susanti staf di satuan kerja kementerian agama sebagai berikut :

“Jadi di kantor kementerian agama ini menggunakan aplikasi sakti full modul sejak tahun 2022, namun sebenarnya untuk proses penerapannya ini kita memulai atau mengikuti pelatihan menggunakan aplikasi sakti full modul ini suda sejak dari tahun 2021 namun pada pengimplemestasiannya di satuan kerja kementerian agama itu baru sejak tahun 2022.”²³

Jadi dapat kita ketahui bahwa penerapan aplikasi sistem keuangan tingkat instansi (SAKTI) full modul ini ada pelatihan yang harus di ikuti terlebih dahulu untuk mengetahui bagaimana penggunaan aplikasi sakti full modul sebelum di terapkan.

Pentingnya Kementerian Agama (Kemenag) kota palu menggunakan aplikasi sistem aplikasi keuangan tingkat instansi (SAKTI) Full Modul terletak pada sejumlah manfaat yang signifikan

²²Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan memberikan pedoman teknis pengelolaan keuangan negara.

²³Susanti, pengelolah keuangan, *Wawancara* di Kantor kementerian agama kota palu, 27 Mei 2024.

dalam pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kemenag. sistem aplikasi keuangan tingkat instansi (SAKTI) Full Modul memfasilitasi pengelolaan anggaran yang lebih efisien, karena semua proses terkait keuangan-mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan-dilakukan dalam satu sistem yang terintegrasi. Dengan aplikasi ini, proses administratif yang sebelumnya memakan waktu dan rawan kesalahan dapat dilakukan dengan lebih cepat, mengurangi beban kerja manual, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran di setiap satker (satuan kerja). Penggunaan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi (SAKTI) Full Modul mendukung prinsip transparansi dalam pengelolaan anggaran negara. Setiap transaksi keuangan, baik yang terkait dengan pencairan dana, pembelian barang, hingga pengeluaran lainnya, tercatat secara jelas dan dapat dipantau oleh pihak yang berwenang secara real-time. Ini mengurangi potensi penyimpangan atau penyelewengan, serta meningkatkan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Dengan transparansi yang lebih baik, masyarakat dan lembaga pengawas juga dapat lebih mudah memantau aliran dana publik.²⁴

Sistem aplikasi keuangan tingkat instansi (SAKTI) Full Modul mempermudah penyusunan laporan keuangan dengan cara yang lebih otomatis dan sistematis. Laporan keuangan yang dihasilkan langsung terintegrasi dengan data transaksi yang telah tercatat, sehingga meminimalkan risiko kesalahan dalam perhitungan dan mempercepat waktu pelaporan. Selain itu, laporan yang dihasilkan juga lebih akurat, sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di pemerintah, dan mudah diakses oleh pihak terkait.

Penggunaan teknologi seperti sistem aplikasi keuangan tingkat instansi (SAKTI) Full Modul juga merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Aplikasi

²⁴ Pemerintahan Kementerian Agama Kota Palu, <https://kalsel.kemenag.go.id/Berita/548319/Sosialisasi-Aplikasi-Sakti-Full-Modul-Kasubbag-Tu-Semua-Tersedia-Dalam-1-Aplikasi> (3 Desember 2024).

ini mengurangi ketergantungan pada proses manual yang memakan waktu dan rawan kesalahan, serta meningkatkan pelayanan publik melalui proses yang lebih modern dan efisien. Hal ini juga sejalan dengan tujuan pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Pentingnya Kementerian Agama (Kemenag) Kota Palu menggunakan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi (SAKTI) Full Modul adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan anggaran yang lebih baik dalam seluruh kegiatan keuangan kementerian. Aplikasi ini tidak hanya mempermudah proses administrasi, tetapi juga meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam penggunaan anggaran negara, mendukung reformasi birokrasi, dan memastikan bahwa anggaran negara digunakan secara tepat dan efisien.

Dengan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi (SAKTI), Kemenag dapat mencapai pengelolaan keuangan yang lebih terintegrasi dan modern, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan pelaksanaan program-program kementerian. Kementerian Agama (Kemenag) Kota Palu menggunakan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi (SAKTI) Full Modul untuk mempercepat dan mempermudah pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kementerian Agama, termasuk di satuan kerja (satker) yang berada di bawah naungannya. sistem aplikasi keuangan tingkat instansi (SAKTI) Full Modul merupakan sistem pengelolaan keuangan negara yang terintegrasi dan berbasis digital yang dirancang untuk mendukung efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.

Sistem aplikasi keuangan tingkat instansi (SAKTI) Full Modul mengintegrasikan berbagai modul yang menyederhanakan banyak aspek administrasi keuangan yang sebelumnya memerlukan berbagai sistem dan aplikasi terpisah. Misalnya, modul perencanaan anggaran, pencairan dana, pengelolaan aset, hingga pelaporan keuangan semuanya ada dalam satu sistem

yang terhubung. Ini mengurangi beban administratif dan mempercepat seluruh proses pengelolaan keuangan.²⁵

Dengan adanya sistem aplikasi keuangan tingkat instansi (SAKTI),kementrian agama (Kemenag) Kota Palu dapat lebih mudah mengelola dan mengalokasikan anggaran sesuai dengan prioritas dan kebutuhan yang ada. Proses perencanaan anggaran yang lebih baik memastikan bahwa dana yang dialokasikan dapat digunakan dengan tepat sasaran, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan dampak positif dari program-program yang dijalankan oleh kementerian.

Untuk memastikan keberhasilan implementasi,kementrian agama (Kemenag) Kota Palu harus mempersiapkan infrastruktur TI yang memadai, melakukan pelatihan intensif kepada pegawai, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. Dengan dukungan yang tepat, sistem aplikasi keuangan tingkat instansi (SAKTI) akan dapat meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan negara di Kemenag secara signifikan. Peneliti melakukan wawancara bersama bapak shodik abdul azis mengenai bagaimana pengimplementasian sistem aplikasi keuangan tingkat instansi (SAKTI) full modul pada laporan pertanggung jawaban di kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) Palu yaitu.

“Mengenai penerapan aplikasi sakti full modul pada laporan pertanggung jawaban di satuan kerja kementrian agama sudah pasti dan sudah jelas bahwa sebelum melakukan implementasi ada yang namanya pelatihan untuk satuan kerja yang menggunakan aplikasi sakti full modul, setelah mengikuti pelatihan seluruh staf sudah pasti paham dalam pengelolaan aplikasi sakti full modul tersebut, setelah itu masuklah pada penerapannya di satuan kerja yang dimana pada penggunaan aplikasi tersebut saya sebagai pengelola keuangan di kementrian agama ini dalam menggunakan aplikasi tersebut alhamdulillah pengelolaan fitur-fiturnya itu dapat saya pahami dengan mudah dan pada penerapannya berjalan dengan baik sebagaimana mestinya, kemudian juga pada saat pembuatan laporan pertanggung jawaban biasanya ketika kita akan mengirim laporan pertanggung jawaban tersebut biasanya terkendalanya di jaringan terkadang ketika jaringan tidak baik biasanya

²⁵Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Palu,
<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kualatungkal/id/titian/sakti.html> (3 Desember 2024).

aplikasi tersebut itu tidak bisa memunculkan fitur-fiturnya yang ada didalam aplikasi tersebut.²⁶

Dari hasil wawancara di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa penerapan aplikasi sakti full modul pada laporan pertanggung jawaban di satuan kerja kementerian agama sebelum penerapan ada yang dinamakan mengikuti pelatihan yang dimana membahas tentang pengelolaan aplikasi sakti full modul tersebut, kemudian pada penerapannya di kantor kementerian agama kota palu ini sudah terbilang berjalan dengan sebagaimana mestinya. penerapan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi (SAKTI) full modul yang baik membawa dampak positif pada efisiensi, transparansi, dan pengelolaan keuangan negara, mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan akuntabel.

Penerapan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi (SAKTI) full modul telah menciptakan ekosistem pengelolaan keuangan yang modern, transparan, dan akuntabel, mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Tantangan yang muncul dalam implementasi telah diatasi dengan baik, menjadikan aplikasi ini sebagai tonggak utama dalam digitalisasi sistem keuangan negara.

Jika sistem aplikasi keuangan tingkat instansi (SAKTI) terus dikelola dengan baik, aplikasi ini dapat menjadi model sistem pengelolaan keuangan berbasis digital yang dapat diadopsi oleh negara lain. Selain itu, keberhasilan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi (SAKTI) juga akan memperkuat citra Indonesia sebagai pelopor dalam digitalisasi tata kelola keuangan pemerintahan di kawasan. Peneliti melakukan wawancara bersama ibu susanti mengenai tanggapan ibu susanti mengenai tanggapannya terhadap aplikasi sakti full modul ini yaitu.

“Tanggapan saya mengenai aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) full modul umumnya positif karena telah memberikan dampak signifikan dalam pengelolaan keuangan negara, yang dimana Aplikasi ini menyederhanakan dan mempercepat alur kerja pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, mengurangi proses manual yang memakan waktu, kemudian Aplikasi ini mendukung reformasi birokrasi dengan

²⁶Susanti, pengelolah keuangan, *Wawancara* di Kantor kementerian agama kota palu, 27 Mei 2024.

digitalisasi sistem keuangan, mengurangi potensi penyimpangan dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.”²⁷

Dari hasil wawancara di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa tanggapan ibu Susanti mengenai aplikasi sakti full modul ini umumnya positif karena telah memberikan dampak signifikan dalam pengelolaan keuangan negara, yang dimana Aplikasi ini menyederhanakan dan mempercepat alur kerja pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, mengurangi proses manual yang memakan waktu, kemudian Aplikasi ini mendukung reformasi birokrasi dengan digitalisasi sistem keuangan, mengurangi potensi penyimpangan dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, aplikasi sistem aplikasi keuangan tingkat instansi (SAKTI) full modul merupakan fondasi utama untuk sistem keuangan negara yang modern, andal, dan berbasis teknologi, serta menciptakan dampak jangka panjang yang positif dalam membangun pemerintahan yang transparan dan terpercaya.

C. Tantangan Teknis Yang Dihadapi Dalam Mengimplementasikan Aplikasi Sakti Full Modul Pada Laporan Pertanggung Jawaban Di Satuan Kerja Kementerian Agama Kota Palu

Tantangan teknis aplikasi merujuk pada berbagai kesulitan atau hambatan yang dihadapi oleh teknisi yang bekerja dengan aplikasi perangkat lunak. Teknisi aplikasi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa aplikasi yang digunakan oleh pengguna atau organisasi berfungsi dengan baik, bebas dari bug, dan aman digunakan. Tantangan ini dapat mencakup berbagai aspek teknis, mulai dari pengembangan hingga pemeliharaan aplikasi.

Teknisi aplikasi sering dihadapkan dengan masalah yang tidak terduga atau bug dalam aplikasi yang mempengaruhi kinerja atau fungsionalitas. Menemukan dan memperbaiki masalah ini bisa sangat menantang, terutama ketika masalah tersebut tidak konsisten atau sulit diidentifikasi.

²⁷Susanti, pengelolah keuangan, *Wawancara* di Kantor kementerian agama kota palu, 27 Mei 2024.

Aplikasi sering kali harus bekerja di berbagai perangkat keras, sistem operasi, atau dengan perangkat lunak lain. Menjaga agar aplikasi tetap kompatibel dengan berbagai platform dan memastikan integrasi yang mulus antara berbagai sistem bisa menjadi tantangan besar.

Dalam dunia digital saat ini, keamanan aplikasi sangat penting. Teknisi aplikasi harus memastikan bahwa aplikasi terlindungi dari ancaman eksternal seperti peretasan atau kebocoran data. Memastikan perlindungan data pribadi dan mengimplementasikan kontrol akses yang tepat juga menjadi tantangan utama. Tantangan teknis aplikasi mencakup berbagai masalah yang memerlukan keterampilan teknis yang kuat, kemampuan untuk berpikir kritis, serta keterampilan komunikasi yang baik dalam berinteraksi dengan pengguna atau tim lain. Teknisi aplikasi memerlukan keterampilan teknis yang kuat, kemampuan manajerial, serta komunikasi yang efektif untuk berhasil dalam pekerjaannya. Peneliti melakukan wawancara bersama ibu Susanti yang membahas tentang tantangan yang dihadapi pada saat penggunaan aplikasi Sakti Full Modul yaitu.

“Jadi tantangan yang saya hadapi pada saat menggunakan Aplikasi Sakti Full Modul adalah kendala konektivitas yang dimana Aplikasi Sakti Full Modul memerlukan koneksi internet yang stabil, masalah konektivitas yang terbatas bisa menghambat implementasi dan pemanfaatan aplikasi.”²⁸

Dari hasil wawancara di atas dapat kita ketahui bahwa tantangan yang dihadapi pada saat menggunakan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi (SAKTI) Full Modul adalah kendala konektivitas yang dimana Aplikasi sistem aplikasi keuangan tingkat instansi (SAKTI) Full Modul memerlukan koneksi internet yang stabil, masalah konektivitas yang terbatas bisa menghambat implementasi dan pemanfaatan aplikasi.

²⁸ Susanti, Pengelola Keuangan, *Wawancara* di Kantor kementerian agama kota palu, 27 Mei 2024.

Untuk mengatasi tantangan penggunaan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi (SAKTI) Full Modul, diperlukan sinergi antara pelatihan SDM, penguatan infrastruktur, pengelolaan data, serta koordinasi lintas unit. Dengan perencanaan dan pendampingan yang baik, aplikasi ini dapat membantu meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Peneliti melakukan wawancara bersama ibu Susanti yang dimana membahas tentang bagaimana solusi yang dilakukan kantor pelayanan perbendaharaan negara (kppn) Palu dalam mengatasi kendala yang ada di satuan kerja yang menggunakan aplikasi sakti full modul seperti kendalan jaringan yaitu.

“Solusi utama untuk mengatasi kendala jaringan internet adalah memastikan adanya koneksi yang lebih stabil dan cepat di wilayah Palu. Ini bisa dilakukan dengan berkoordinasi dengan penyedia layanan internet untuk meningkatkan *bandwidth* dan memperbaiki kualitas jaringan di Lokasi kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) Palu dan satker terkait. Menyediakan alternatif jaringan seperti mobile hotspot atau VPN agar tetap bisa terhubung meskipun jaringan utama mengalami gangguan Melakukan pengadaan atau upgrade perangkat keras (komputer, server) yang memadai untuk mendukung operasional sistem aplikasi keuangan tingkat instansi (SAKTI). Perangkat keras yang lebih cepat dan up-to-date akan meminimalkan hambatan teknis dalam pengoperasian aplikasi.”²⁹

Dapat kita ketahui adalah Solusi dari mengatasi kendala jaringan internet adalah memastikan adanya koneksi yang lebih stabil dan cepat di wilayah Palu. Ini bisa dilakukan dengan berkoordinasi dengan penyedia layanan internet untuk meningkatkan *bandwidth* dan memperbaiki kualitas jaringan di Lokasi kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) Palu dan satker terkait. Menyediakan alternatif jaringan seperti mobile hotspot atau VPN agar tetap bisa terhubung meskipun jaringan utama mengalami gangguan Melakukan pengadaan atau upgrade perangkat keras (komputer, server) yang memadai untuk mendukung operasional aplikasi system aplikasi

²⁹ Susanti, pengelolah keuangan, *Wawancara* di Kantor kementerian agama kota palu, 27 Mei 2024..

keuangan tingkat instansi (SAKTI). Perangkat keras yang lebih cepat dan up-to-date akan meminimalkan hambatan teknis dalam pengoperasian aplikasi.

Untuk mengatasi tantangan ini, keberhasilan implementasi sistem aplikasi keuangan tingkat instansi (SAKTI) Full Modul memerlukan pendekatan terpadu antara Pelatihan intensif untuk pengguna, Peningkatan infrastruktur dan teknologi, Perencanaan yang baik untuk manajemen perubahan, Dukungan teknis berkelanjutan, dan Komitmen seluruh pihak dalam memanfaatkan aplikasi secara optimal. Dengan strategi yang tepat, sistem aplikasi keuangan tingkat instansi (SAKTI) dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.

Penggunaan Aplikasi SAKTI Full Modul di satuan kerja (satker) yang dilayani oleh KPPN Palu memiliki berbagai dampak positif dan tantangan. Aplikasi ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan negara.

Aplikasi SAKTI Full Modul memberikan dampak yang besar dalam meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan satker. Namun, tantangan seperti kesiapan SDM, infrastruktur, dan adaptasi teknologi harus dikelola dengan baik untuk memaksimalkan manfaatnya. Dukungan berkelanjutan dari pemerintah, pelatihan, serta penguatan infrastruktur adalah kunci keberhasilan implementasi aplikasi ini.

“jadi mengenai dampak penggunaan aplikasi sakti full modul ini dapat berdampak positif yang dimana dapat mempercepat pengelolaan anggaran dan pelaporan di satker wilayah Palu, mengurangi waktu yang sebelumnya dihabiskan untuk koordinasi manual, dan juga meningkatkan kepercayaan terhadap laporan keuangan satker karena data lebih akurat dan dapat diaudit dengan lebih baik oleh KPPN Palu, kemudian juga Memudahkan KPPN Palu dalam memproses pencairan anggaran dari satker tanpa harus bolak-balik dokumen fisik. dan ada juga dampak negatifnya yang dimana. Aplikasi SAKTI terkadang mengalami gangguan teknis seperti waktu loading yang lama atau server down, terutama pada periode sibuk seperti akhir tahun anggaran, Menghambat pengiriman laporan atau proses pencairan dana di KPPN Palu. Satker menjadi sangat bergantung pada aplikasi ini. Ketika terjadi gangguan, pekerjaan

bisa berhenti. Satker harus menunggu penyelesaian masalah teknis sebelum melanjutkan proses kerja.”³⁰

Dapat kita ketahui dari hasil wawancara di atas adalah dampak penggunaan aplikasi sakti full modul ini dapat berdampak positif yang dimana dapat mempercepat pengelolaan anggaran dan pelaporan di satker wilayah Palu, mengurangi waktu yang sebelumnya dihabiskan untuk koordinasi manual, dan juga meningkatkan kepercayaan terhadap laporan keuangan satker karena data lebih akurat dan dapat diaudit dengan lebih baik oleh KPPN Palu, kemudian juga Memudahkan KPPN Palu dalam memproses pencairan anggaran dari satker tanpa harus bolak-balik dokumen fisik. dan ada juga dampak negatifnya yang dimana. Aplikasi SAKTI terkadang mengalami gangguan teknis seperti waktu loading yang lama atau server down, terutama pada periode sibuk seperti akhir tahun anggaran, Menghambat pengiriman laporan atau proses pencairan dana di KPPN Palu. Satker menjadi sangat bergantung pada aplikasi ini. Ketika terjadi gangguan, pekerjaan bisa berhenti. Satker harus menunggu penyelesaian masalah teknis sebelum melanjutkan proses kerja.

Penggunaan aplikasi di wilayah KPPN Palu memberikan manfaat besar dalam meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi keuangan. Namun, keberhasilan implementasi membutuhkan dukungan teknis yang memadai, peningkatan infrastruktur, dan adaptasi SDM. Dengan strategi mitigasi yang tepat, dampak positif dari aplikasi ini dapat dioptimalkan, membantu KPPN Palu dan satker di bawahnya untuk mencapai pengelolaan keuangan yang lebih baik.

SAKTI Full Modul dapat memberikan dampak signifikan dalam menciptakan tata kelola keuangan negara yang lebih efisien, transparan, dan modern. Meskipun tantangan tetap ada,

³⁰Sigit Harjanto, Kepala Lembaga KPPN Palu, *Wawancara* di Kantor Lembaga KPPN Palu, 17 Mei 2024.

strategi yang tepat seperti peningkatan dukungan teknis, pelatihan berkelanjutan, dan penguatan infrastruktur akan memastikan bahwa dampak positif dari aplikasi ini terus berkembang, memberikan manfaat jangka panjang bagi pemerintah dan masyarakat.

Penggunaan Aplikasi SAKTI Full Modul memiliki dampak positif yang luar biasa dalam efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Meski tantangan tetap ada, pendekatan strategis seperti penguatan pelatihan, pengembangan infrastruktur, dan inovasi teknologi dapat memastikan aplikasi ini tetap relevan dan berdaya guna dalam jangka panjang. Keberhasilan implementasi juga memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah pusat, KPPN, dan satker untuk memastikan seluruh pihak mendapatkan manfaat maksimal dari sistem ini.

Penggunaan Aplikasi SAKTI Full Modul merupakan langkah besar dalam digitalisasi pengelolaan keuangan negara. Dampaknya melampaui efisiensi dan akuntabilitas, menuju tata kelola yang lebih transparan, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Untuk memaksimalkan manfaat dan mengatasi tantangan, pemerintah perlu terus berinvestasi dalam infrastruktur, pelatihan SDM, dan inovasi teknologi, memastikan aplikasi ini tetap relevan dan mampu mendukung reformasi birokrasi serta pengelolaan anggaran yang lebih baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “ Implementasi Sakti Full Modul Pada Laporan Pertanggung Jawaban Satuan Kerja di Kppn Palu”, maka dapat disimpulkan bahwa:

Implementasi SAKTI Full Modul pada laporan pertanggungjawaban di KPPN Palu adalah upaya untuk memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan secara lebih efektif, efisien, dan terintegrasi. Secara umum tugas KPPN ini sangat penting, karena bertanggungjawab untuk menjadi wakil bendahara umum dalam menyalurkan dan membebaskan biaya apapun yang ada di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah melakukan pencairan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), di mana anggaran tersebut sudah tertuang di dalam dokumen pelaksana anggaran DIPA (Daftar Isian Pelaksana Anggaran). Artinya dana APBN adalah tugas pemerintah, dana tersebut disalurkan ke daerah melalui satuan kerja (satker) vertikal masing-masing kementerian.

Penerapan solusi-solusi di atas, kendala dalam implementasi SAKTI full modul pada Laporan Pertanggung Jawaban di Kantor pelayanan perbendaharaan negara KPPN Palu dapat diatasi. Peningkatan kapasitas SDM, infrastruktur teknologi yang lebih baik, serta sinkronisasi data yang lebih efektif adalah langkah-langkah kunci untuk memastikan bahwa Sistem aplikasi keuangan tingkat instansi SAKTI dapat digunakan secara optimal dan menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu.

B. Impikasi

Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Full Modul membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya dalam hal penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) Satuan Kerja (Satker) di wilayah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palu. Implementasi SAKTI Full Modul juga memberikan dampak positif yang besar pada laporan pertanggungjawaban Satker di KPPN Palu. Meskipun terdapat beberapa tantangan teknis dan non-teknis, manfaat seperti peningkatan efisiensi, transparansi, dan akurasi laporan jauh lebih besar. Dalam jangka panjang, SAKTI akan memperkuat pengelolaan keuangan negara, mendukung tata kelola yang lebih baik, dan mempermudah pengawasan keuangan oleh lembaga terkait.

C. Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai “ Implementasi Sakti Full Modul Pada Laporan Pertanggung Jawaban Satuan Kerja Di Kppn Palu,” yang telah dilakukan penulis, maka penulis menyarankan yaitu sebagai berikut:

Untuk UIN Datokarama Palu, peneliti menyarankan agar Implementasi Sakti Full Modul Pada Laporan Pertanggung Jawaban Satuan Kerja Di Kppn Palu Membangun kemitraan yang lebih erat dengan UIN Datokarama Palu untuk mengadakan seminar, lokakarya, dan diskusi panel tentang tantangan dan peluang dalam implementasi SAKTI. Ini dapat memberikan wawasan baru bagi kedua belah pihak.

Untuk Staf-staf keuangan sangat penting untuk memastikan mereka memahami modul-modul dalam SAKTI, termasuk modul anggaran, pembayaran, dan pelaporan. Pihak kampus perlu berkoordinasi dengan KPPN Palu untuk menyelenggarakan pelatihan secara rutin dan Kampus juga perlu menyediakan sesi pembelajaran berkelanjutan bagi staf, terutama terkait pembaruan fitur-fitur baru di SAKTI.

Untuk peneliti berikutnya, diharapkan supaya bisa menambah dan mengkaji secara mendalam dengan objek penelitian dan sudut pandang yang berbeda terkait dengan Pada Laporan

Pertanggung Jawaban Satuan Kerja di Kppn Palu agar lebih paham tentang keungan dan laporan pertanggung jawaban mengenai aflikasi SAKTI.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika 2012.
- Anthoni, R. & Govinddararajan. *Management Control System*. Jakarta: Salemba Empat, 2005.
- Arikunto, Suharsmi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Cet. XI., Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998.
- Brown, James. *Peran KPPN dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jurnal Keuangan Pemerintahan Lokal, 2018.
- Cahyo, Luthfi Septian. *Analisis Penerapan Aplikasi SAKTI Modul Bendahara di KPPN Purwokerto*. Karya Tulis Tugas Akhir, Politeknik Keuangan Negara STAN Tangerang Selatan, 2022.
- Doe, Ohn. Pengantar Implementasi Sistem Keuangan. Jurnal Keuangan Modern, No.2, (2021).
- Dwi, Astutuk Ani. *Evaluasi Realesai Anggaran Sebagai Tolak Ukur Kinerja Satuan Kerja dalam Wilaya Pembayaran KPPN Mojokerto*. Skripsi; Malang: Fakultas Hukum, Universitas Negeri Malang, 2011.
- Fauzi, Ahmad dkk. *Metodologi Penelitian*. Cetakan Pertama; Banyumas: CV. Pena Persada, 2022.
- Fhatoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006.
- Haifah, Almira Nur. *Tinjauan Atas Kesiapan Implementasi Modul Bendahara dalam Aplikasi SAKTI pada Satuan Kerja di Wilayah KPPN Malang*. Universitas Gajah Mada, 2010.
- Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Hasanah, Nurmalia. Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi di Masa Pandemi Covid-19 pada KPPN Palembang. Journal Publicuho, No.3, (2021).
- Kementerian Keuangan, Direktorat Jendral Perbendaharaan. *Laporan Pertanggungjawabann Bendahara (LPJ Bendahara)*. <https://djpb.kemenkeu.go.id>
- Khafid, Muhammad. *Analisis Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD*. Semarang: Jurnal Dinamika Akuntansi, Vol.1, No.2, 2009.
- Mentrei Keuangan. “Undang- Udang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Sisitem Sakti,” Dalam Benni Riyanto. Perpajakan Indonesia. Jakarta, 2021.
- Lee, Robert D. Jr. dan Ronald W. Johnson. *Public Budgeting Systems*. Sixth edition; Gaithersburg Maryland: Aspen Publishers, Inc, 1998.

- Milles, Matthew B. dan A. Michael Hubberman. *Qualitatif data Analisis, diterjemahkan oleh Tjetjep Rehendy, Analisis Kualitatif*. Cet. I; Jakarta: UI Press, 1992.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001
- Menteri Keuangan. “Teknis Penggunaan Aplikasi Sakti“
<https://jdih.kemenkeu.go.id/> Penilaian Kompetensi PPK Dan PPSPM (21 Januari 2025)
- _____. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Nasution, Riski Nur Amalia. *Penerapan Aplikasi Sakti dalam Pengelolaan Keuangan di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera*. ALEXANDRIA; Mataram: Journal of Economics, Business, Tourism & Entrepreneurship, 2022.
- Nasution. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*.Cet: VIII; Bandung : Bumi Aksara, 2006.
- Noor, Juliansah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011.
- Satori, Djam’an dan Aan Komariah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2009.
- Schneider, A. dan H. Ingram. *Social Constructions in the Study of Public Policy*. New York, 2008.
- Sitanggang, Debora Danisa Kurniasih Perdana. *Laporan Pertanggungjawaban (LPJ): Fungsi, Format, dan Cara Buat*. artikel detikfinance. <https://finance.detik.com>
- Sjamsuddin, Sjamsiar. *Hukum Administrasi Negara*. Malang: Setara Press, 2019.
- Smith, Jane. *Penerapan SAKTI dalam Manajemen Keuangan Pemerintah*. Jurnal Akuntansi Publik, Vol.15, No.3, 2022.
- Subrata, Suryadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sugiono, D. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif , Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo, 2002.

Lampiran-Lampiran

Pedoman wawancara KPPN

Berikut beberapa pedoman wawancara kppn :

1. Bagaimana aplikasi sakti full di gunakan dalam menyusun laporan pertanggung jawaban keungan kppn kota Palu?
2. Sejauh mana pemahaman atau optimalisasi pegawai perbendaharaan dalam penggunaan aplikasi sakti full dalam laporan pertanggung jawaban kppn palu?
3. Bagaimana aplikasi SAKTI di gunakan menyusun laporan pertanggungjawaban keuang KPPN?
4. Apakah ada kendala atau tantangan yang di hadapi oleh KPPN dalam menggunakan aplikasi SAKTI, dan bagai mana anda mengatasi masalah tersebut?
5. Bagaimana pelatihan dan dukungan teknis diberikan kepada staf KPPN untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi SAKTI?

Pedoman wawancar untuk instansi :

1. Bagai mana proses penerapan aplikasi SAKTI full modul pada dalam satker anda?
2. Apa manfaat utama yang anda lihat dalam menggunakan aplikasi SAKTI dangan modul penuh dalam penyusunan laporang pertanggungjawaban Satker?
3. Bagai mana anda memastikan bahwa data yang di masukkan kedalam aplikasi SAKTI adalah akurat dan lengkap
4. Apa manfaat utama yang anda lihat dalam menggunakan aplikasi SAKTI dengan modul penuh dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban satker?
5. Bagai mana aplikasi SAKTI membantu dalam meningkatkan efesiensi dalam proses penyusunan laporang pertanggung jawaban Satker?

Dokumentasi Wawancara



Wawancara 1 : Bapak Shodik Abdul Aziz Staf Ptpn



Wawancara 2 ibu susanti pengelolah keuangan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.
Website : www.iainpalu.ac.id email: humas@iainpalu.ac.id

Nomor : 2340 /Un.24/F.V/PP.00.9/06/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Palu, 1 Juni 2024

Kepada Yth.
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palu
di -
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

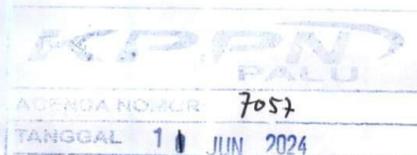
Nama : Agung wahyudi
NIM : 19.5.15.0107
TTL : Palu 19 juli 2000
Semester : X (Sepuluh)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Alamat : Palupi

Untuk melakukan Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **“Implementasi sakti full modul pada laporan pertanggung jawaban satuan kereja di kppn palu”**

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan Penelitian di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palu

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.



Dekan,

Sagir Mohammad Amin



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI
SULAWESI TENGAH
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 PALU
Jl. Tanjung Dako No. 11, Palu 94112; TELEPON (0451) 421015-421125; FAKSIMILE (0451) 421225; SUREL
kppn.palu@kemenkeu.go.id; LAMAN www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/palu

Nomor : [@NomorND]
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

7 Juni 2024

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Datokarama Palu

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Datokarama Palu tanggal 5 Juni 2024 Hal Izin Penelitian, dengan ini disampaikan bahwa kami memberikan izin kepada :

Nama : Agung Wahyudi
NIM : 19.5.15.0107
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Untuk melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palu, dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Implementasi SAKTI Full Modul pada Laporan Pertanggungjawaban Satuan Kerja di KPPN Palu."

Demikian kami sampaikan, terima kasih.

An. Kepala KPPN Palu
Kepala Subbagian Umum



Ditandatangani secara elektronik

Sigit Harjanto



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU**

Jalan Bantilan Nomor 16 Palu
Telepon (0451) 460355; Faksimili (0451) 460093
Website : <http://kemenagkotapalu.go.id>

Nomor : 2932/Kk.22.08/1/HM.01/7/2022

29 Juli 2024

Lampiran :

Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Datokarama Palu
Palu

Assalamu Alaikum War. Wab.

Menindaklanjuti surat dari Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Nomor : 2659/Un.24/F.V/PP.00.9/07/2024 tanggal 03 Juli 2024 perihal Izin Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi pada Kantor Kementerian Agama Kota Palu oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan nama sebagai berikut :

Nama : Agung Wahyudi
NIM : 195150107
Semester : X
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Perbankan Syariah

maka dengan ini kami bersedia / memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan penelitian di Kantor Kementerian Agama Kota Palu

Demikian penyampaian kami, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalam
Kepala



H. IRSAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالانو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165
Website : www.uindatokarama.ac.id email: humas@uindatokarama.ac.id

PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Nama : Agung Wahyudi NIM : 105150307.....
TTL : Palu 14 Juli 2000 Jenis Kelamin : Laki-laki
Jurusan : PERBAHAKAN SYARIAH Semester : 7
Alamat : Palu HP : 0812 38418524

Judul :

- o Judul I
Implementasi Sakti Full modul pada Laporan pertanggung
jawaban satuan kerja di KPPN Palu.....
- o Judul II
faktor-faktor yang mempengaruhi sistem kinerja KPPN Palu.....
- o Judul III
Analisis yang mempengaruhi manajemen resiko keuangan operasional
terhadap Lembaga Keuangan KPPN Palu.....

Palu, 31 Januari 2023

Mahasiswa,

Agung wahyudi

NIM 105150307

Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan :

Pembimbing I : Nurwanita, M.Ag

Pembimbing II: Dede Arseyani

a.n. Dekan

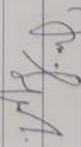
Wakil Dekan BIDANG AKADEMIK DAN
KELEMBAGAAN,

Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag
NIP.19770331 200312 2 002

Ketua Jurusan,

Dr. Syaakir Sofyan, S.I.L., M.E.
NIP. 19860204 2014031 002

**KARTU KEHADIRAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALU**

NO.	NAMA MHS YANG DIUJI	JUDUL PROPOSAL	TTD PENGUJI
1	Fadlun	PERKEMBANGAN DAN PERMASALAHAN KEHUTANAN DAN PERUMAHAN RUMAH SAKIT (PR) DI KOTA PALU	
2	Siti Masriyah	PERKEMBANGAN DAN PERMASALAHAN KEHUTANAN DAN PERUMAHAN RUMAH SAKIT (PR) DI KOTA PALU	
3	Zahra Nurfitriyanti	PERKEMBANGAN DAN PERMASALAHAN KEHUTANAN DAN PERUMAHAN RUMAH SAKIT (PR) DI KOTA PALU	
4	Mus Aulia	PERKEMBANGAN DAN PERMASALAHAN KEHUTANAN DAN PERUMAHAN RUMAH SAKIT (PR) DI KOTA PALU	
5	Suwarni	PERKEMBANGAN DAN PERMASALAHAN KEHUTANAN DAN PERUMAHAN RUMAH SAKIT (PR) DI KOTA PALU	
6			
7			
8			
9			
10			

Mahasiswa Ybs.



NIM.

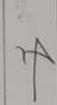
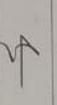
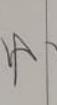
Palu,

An. Dekan,

Ketua Jurusan / sek.

Jurusan

NIP.

NO.	HARI/TANGGAL KONSULTASI	MATERI BIMBINGAN PROPOSAL / SARAN	TANDA TANGAN		KETERANGAN
			PEMBIMBING I	PEMBIMBING II	
1	Senin 13 Mei 2024	Bab I : fenomena Market dipertanian			
2		Bab II : Tani yg disuntik dipertanian			
3		Bab III : Metode dipertanian			
4	Jumat 29 Maret 2024	Sistemahika pertanian bab I - III			
5	Senin 13 Mei 2024	Penyakit Tumbuhan proposal untuk diseminarka			
6					
7					
8					
9					
10					

Pembimbing I,


 Nur Kanti S. Ag, M. Ag
 NIP. 197606262003102008

Telah diperiksa dan disetujui

Pembimbing II,


 NIP.

Daftar riwayat hidup



A. Identitas diri

Nama : Agung Wahyudi
Tempat, tanggal lahir : Palu, 19 Juli 2000
Jenis kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Palupi
No. Hp : 082238148524
Email : aw32299@gmail.com

B. Riwayat pendidikan

SD : Sdit Qurrota'ayyun
SMP : Ppm Al-Istiqomah
SMA : Ppm Al-Istiqomah